

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Edisi Cetakan ke-3, (Bandung: Alumni 2005)
- Diningrat, S., *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito 1982)
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2021)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Balai Pustaka 1989)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Refika Aditama, Bandung, 2008)
- Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011)
- H. Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya, PT. Revka Petra Media, 2016)
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- H. Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- H. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Jakarta: Prodeo Et Patria, 2010)
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- I.G. Rai Widjaya dan Herman Sudrajat, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006)

- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006)
- Komariah, *Hukum Perdata* (edisi revisi). (Malang: Penerbit UMM Press, 2016)
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003)
- Rossa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law Obligation), Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, (Pustaka Larasan: Denpasar Bali, 2012)
- L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita 1983)
- M. Chief, *Black's Dictionary*, (St Paul Minessota : Mwest Group, 2000)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2014)
- Mukadir Iskandar Syah, *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Kpegawaian*, (Jakarta: Jala Permata Angkasa, 2023)
- Matahari Giska, Gegana, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-prinsip Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000)

Sutan Remmy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti: 2002)

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 1988)

Setiawan, I. K. O., *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. (Jakarta: PT. Citra Aditya, 2007)

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi 2010)

Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Red Wite Publishing, 2021)

B. Jurnal :

Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Andrew Law, No. 1 Vol 3, 2022

Anak Agung Bagus Juniarta & Gede Made Swardhana, “Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 Nomor 20, 2021

Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia Dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, No 1, Vol. 8, 2014

- Desni Raspita, “Peran Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Doctrinal, Vol. 5 Nomor 2, 2020
- Fariz Rachman Iqbal, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)”, Jurist-Diction Vol. 3 Nomor 1, 2020
- Ramdani, “Penerapan Tangung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) Jurnal Al-Amwal, Vol 1 Nomor 1, 2018
- Rizha Claudilla Putri, “Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia”, Jurnal Cepalo, Vol. 4 Nomor 1, 2020
- Martin Rich Arianto & Gunawan Djajaputra “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian Terhadap Tanggung Jawab Notaris), Dinasti Research, Vol. 7 Nomor 2, 2024
- N. A. Rahman et al., “Limited Liability Partnership (LLP@PLT) : New Business Vehicle For The Malaysian Legal And Accounting Private Practice”, Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 23, Nomor. 11, 2015
- N. Ike Kusmiati, “Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”. Jurnal Litigasi, Vol. 17 Nomor 1, 2016, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>
- Setyo Sardino, dkk “Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi Debitor Bank”, Honeste Vivere Journal, No. 1 Vol 33, 2023, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.178>
- Setiawan, M. Q. (2023). “Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Antara Kreditur dengan Perseroan Komanditer (CV) Selaku Penanggung Hutang”. UNES Law Review, 5(4), Agustus 2023
- Hazhin, U. M. & Gaol, H. S. L., “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing”, Kertha Patrika, No. 2 Vol 41, 30 Agustus 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/51367>

Ida Bagus Abhimantara, “Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer) Sebagai Corporate Guarantee Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Notaire*, No. 3 Vol 2, Oktober 2019

Khrisna Adjie Laksana dan Tjhong Sendrawan, “Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda”, *Jurnal Usm Law Review*, No. 3, Vol 6, 2023

Wardah, “Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016)”, *Literasi Hukum*, No. 2 Vol 2, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang

Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

D. Website

Silas Bamigbola, 2024, GmbH: Definition, Requirements, and Comparison to LLCs – SuperMoney

Start Business, 2017, What is a BV? - Starting a business in the Netherlands
(startingabusinessnl.com)

Taufik Riyadi Nirizki Putra, ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PKPU
TERHADAP PENANGGUNG YANG MELEPASKAN HAK
ISTIMEWANYA, 2021, TRNP Law Firm. [https://trnplaw.com/id/analisis-
yuridis-permohonan-pkpu-terhadap-penanggung-yang-melepaskan-hak-
istimewanya/](https://trnplaw.com/id/analisis-yuridis-permohonan-pkpu-terhadap-penanggung-yang-melepaskan-hak-istimewanya/)

